

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, secara umum peneliti menyimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* di Desa Telaga Murni tidak terlibat secara langsung, melainkan hanya sebagai pengawas dan penyampaian aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan pembangunan ataupun kritik serta masukan kepada pemerintahan desa dan di dalam pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* di Desa Telaga Murni belum dapat berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala namun sudah dapat dianalisis bahwa Desa Telaga Murni memfokuskan pembangunan untuk mencapai tujuan SDGs Desa *goals* 8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. Secara lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Telaga Murni tidak ada keterlibatannya secara langsung, BPD dalam pelaksanaannya hanya sebagai pengawas, baik pengawas penggunaan anggaran dan pengawas pelaksanaan program pembangunan, selain itu juga BPD memiliki peran dalam menjaring dan menyampaikan setiap keluhan ataupun masukan terkait dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya disampaikan dan dibahas pada tingkat dusun melalui Musyawarah Dusun (MUSDUS), kemudian setelah dipilih berdasarkan prioritasnya diajukan kedalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kemudian dibahas kembali di Musrenbang tingkat kecamatan, apabila memerlukan anggaran bernilai melebihi 50 juta usulan tersebut diajukan kembali ke tingkat kabupaten.

2. Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Indikator yang pertama yaitu komunikasi, komunikasi tersebut yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Kepala Desa dan Ketua Tim Pokja sebagai penanggung jawab, membawahi beberapa anggota relawan lapangan ini sebagai pendata/pencacah, inputor, dan sebagai pengawas (pengawas lapangan dan pengawas inputor) dengan masyarakat desa. Indikator kedua sumberdaya, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup dalam segi jumlah dan kemampuan sudah mumpuni, selanjutnya Sumber Daya Anggaran sudah relative cukup. Indikator ketiga yaitu disposisi, disposisi dalam penyampaian program dilakukan oleh pemerintah pusat yang disampaikan kepada Tim Pokja desa, serta dalam pelaksanaannya Kordinator SDGs membagi tugas dan mengawasi seluruh anggota Tim Pokja. Indikator yang terakhir yaitu struktur birokrasi, pemilihan struktur yang terlibat di dalam pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam program SDGs Desa.

Dalam pelaksanaan implementasi SDGs di Desa Telaga Murni masih terdapat beberapa kendala seperti adanya miss komunikasi dengan masyarakat sehingga masih adanya masyarakat yang belum mengerti dalam mengisi kuesioner, bahkan ada beberapa masyarakat yang menolak untuk dimintai data karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi terkait kuesioner untuk data SDGs tersebut, tidak hanya itu kendala juga terdapat pada server yang mengakibatkan data yang di input belum dapat terselesaikan proses penginputan kedalam aplikasi SDGs yang disediakan oleh KEMENDES.

3. Upaya Guna mencapai tujuan SDGs, Desa Telaga Murni dalam hal itu memfokuskan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi merata yang nantinya diharapkan bisa mengentas kemiskinan yang mana berjumlah 6,79 % dari penduduk desa, dalam upaya menghapus kemiskinan yang ada. Desa Telaga Murni membuat program yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dengan membantu masyarakat desa yang belum mempunyai penghasilan. Selain itu juga Desa Telaga Murni sedang memfokuskan dalam pengoptimalan dan pengaktifan kembali BUMDes yang ada. Dalam pelaksanaannya BUMDes yang ada masih belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan masih dalam tahap pembangunan gedung untuk BUMDes dan pengoptimalan kembali pasca BUMDes yang sudah ada sebelum tahun 2021 tidak berjalan sebelumnya.

Dengan adanya BUMDes diharapkan mampu mengelola seluruh aset-aset dan memanfaatkan potensi yang ada di desa guna membantu seluruh masyarakat desa yang masih dikategorikan sebagai masyarakat miskin sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi desa merata. Serta dalam pelaksanaan program BLK masih belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan pengelolaannya yang masih belum tersentralisasi serta program-program pelatihan yang ada masih harus dimaksimalkan kembali.

## **5.2 Rekomendasi**

Penulis dalam bagian ini menyampaikan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Adapun rekomendasi yang diberikan terbagi menjadi dua yakni, pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis, sebagai berikut:

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian Sistem Administrasi Pemerintahan Desa dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti lain dapat melanjutkan penelitian lanjutan dengan teori-teori dan metodologi yang berbeda agar hasil yang di dapat dapat dikembangkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Untuk mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi agar dapat menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Implementasi Program *Sustainable Development Goals* yang ada di desa.
4. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi semoga dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak orang terutama untuk mahasiswa dan dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program *Sustainable Development Goals*.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud ingin memberikan beberapa rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi dengan harapan dapat bermanfaat bagi lembaga atau instansi tersebut, yaitu:

1. Selanjutnya untuk BUMDes yang baru merintis kembali diharapkan dapat ditingkatkan kembali dengan menggali potensi-potensi atau memanfaatkan aset-aset yang ada serta mencontoh dari beberapa BUMDes yang telah berhasil agar memberikan dampak yang signifikan terhadap berlangsungnya BUMDes khususnya untuk mengentas kemiskinan yang ada di desa. Peneliti merekomendasikan beberapa BUMDes yang telah berhasil untuk diterapkan di Desa Telaga Murni seperti BUMDes Multianggaluku Mandiri Dengan membuka toko penyaluran barang-barang bersubsidi dari pemerintah seperti beras, gas elpiji, gula dan bawang merah, BUMDes Cibodas dengan penyaluran air bersih, BUMDes Desa Pandowoharjo dengan memanfaatkan pengelolaan sampah, sampah tersebut diolah kemudian dipilah mulai dari

Sampah anorganik yaitu botol, kardus, dan plastik untuk dijual. Sampah organik difermentasi untuk diolah menjadi kompos dan memakan waktu kurang lebih 3 hingga 4 minggu. BUMDes tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk diterapkan oleh BUMDes Desa Telaga Murni sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2. Selanjutnya untuk BLK yang baru merintis diharapkan dapat segera direalisasikan untuk bangunan gedungnya agar pelaksanaannya segera tersentralisasi dan dimaksimalkan kembali pelatihannya agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan penghasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa. Rekomendasi bagi pelaksanaan BLK itu sendiri dalam pelatihannya bisa mengikuti kebutuhan industri dan perkembangan zaman yang ada seperti diadakannya pelatihan untuk desain grafis, pelatihan komputer seperti excel dan multimedia lainnya, dan pelatihan untuk memasarkan produk pada *market place* dan *e-commerce* dilihat potensi dari jumlah penduduk yang bergerak pada sektor usaha perdagangan di Desa Telaga Murni yang berjumlah 4.282, jumlah yang cukup banyak tersebut dapat dimanfaatkan oleh BLK.
3. Dengan adanya program *Sustainable Development Goals* di desa diharapkan dapat membantu pembangunan di desa lebih baik dan lebih terarah sesuai dengan potensi dan analisis kebutuhan masyarakat desa agar mampu memberikan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat desa pada tahun 2030.

4. Diharapkan kedepannya seluruh masyarakat, aparatur desa, bpd dan tokoh masyarakat yang ada di desa lebih aktif untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di desa untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* Desa pada tahun 2030.
5. Diharapkan untuk lebih informatif penginformasian setiap program pembangunan dan laporan keuangan kepada masyarakat dapat menggunakan media seperti internet seperti website, sosial media, ataupun media lain seperti baliho yang sudah diterapkan di beberapa desa di Indonesia.